



1 PENDAHULUAN

2

3 Tujuan dan Peranan

4

5 1. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari
6 penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para
7 penggunanya. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan
8 sebagai acuan bagi:

- 9 (a) penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam
10 pelaksanaan tugasnya;
- 11 (b) penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah
12 akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar
13 akuntansi keuangan syariah;
- 14 (c) auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah
15 laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi
16 syariah yang berlaku umum; dan
- 17 (d) para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan
18 informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang
19 disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

20
21 2. Pengertian transaksi syariah yang dimaksud dalam
22 kerangka dasar ini adalah transaksi yang dilakukan berdasarkan
23 prinsip syariah.

24

25 3. Kerangka dasar ini bukan standar akuntansi keuangan
26 dan karenanya tidak mendefinisikan standar untuk permasalahan
27 pengukuran atau pengungkapan tertentu.

28

29 4. Revisi kerangka dasar ini akan dilakukan dari waktu
30 ke waktu sesuai dengan pengalaman badan penyusun standar
31 akuntansi keuangan syariah dalam penggunaan kerangka dasar
32 tersebut.

33

34 Ruang Lingkup

35

36 5. Kerangka dasar ini membahas:

- 37 (a) tujuan laporan keuangan;
- 38 (b) karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi



1 dalam laporan keuangan; dan
2 (c) definisi, pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang
3 membentuk laporan keuangan.

4

5 6. Kerangka dasar ini membahas laporan keuangan untuk
6 tujuan umum (*general purpose financial statements*, yang
7 selanjutnya hanya disebut “laporan keuangan”), termasuk
8 laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan disusun dan
9 disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi
10 kebutuhan sejumlah besar pemakai. Beberapa di antara pemakai
11 ini memerlukan dan berhak untuk memperoleh informasi
12 tambahan di samping yang tercakup dalam laporan keuangan.
13 Namun demikian, banyak pemakai sangat tergantung pada
14 laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan
15 dan karena itu laporan keuangan tersebut seharusnya disusun
16 dan disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka.
17 Laporan keuangan dengan tujuan khusus seperti prospektus,
18 dan perhitungan yang dilakukan untuk tujuan perpajakan tidak
19 termasuk dalam kerangka dasar ini.

20

21 7. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses
22 pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi
23 laporan keuangan atas kegiatan komersial dan atau sosial.
24 Laporan keuangan kegiatan komersial meliputi neraca, laporan
25 laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat
26 disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan
27 arus kas, atau laporan perubahan ekuitas), laporan perubahan
28 dana investasi terikat, catatan dan laporan lain serta materi
29 penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan
30 keuangan. Laporan keuangan atas kegiatan sosial meliputi
31 laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber
32 dan penggunaan dana kebajikan. Di samping itu juga termasuk,
33 skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan
34 tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan
35 geografis.

36

37 8. Kerangka dasar ini berlaku untuk semua jenis transaksi
38 syariah yang dilaporkan dalam laporan keuangan entitas syariah



1 maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor
2 swasta. Entitas syariah pelapor adalah entitas syariah yang
3 laporan keuangannya digunakan oleh pemakai yang
4 mengandalkan laporan keuangan tersebut sebagai sumber utama
5 informasi keuangan entitas syariah.

6

7 **Pemakai dan Kebutuhan Informasi**

8

9 9. Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang
10 dan investor potensial; pemilik dana *qardh*; pemilik dana
11 investasi *mudharabah*; pemilik dana titipan; pembayar dan
12 penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf; pengawas syariah;
13 karyawan; pemasok dan mitra usaha lainnya; pelanggan;
14 pemerintah serta lembaga-lembaganya; dan masyarakat.
15 Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi
16 beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa
17 kebutuhan ini meliputi:

18 (a) *Investor*. Investor dan penasehat berkepentingan dengan
19 risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi
20 yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi
21 untuk membantu menentukan apakah harus membeli,
22 menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang
23 saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan
24 mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah untuk
25 membayar dividen.

26 (b) *Pemberi dana qardh*. Pemberi dana *qardh* tertarik
27 dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka
28 untuk memutuskan apakah dana *qardh* dapat dibayar pada
29 saat jatuh tempo.

30 (c) *Pemilik dana syirkah temporer*. Pemilik dana *syirkah*
31 temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan
32 yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan
33 investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan
34 aman.

35 (d) *Pemilik dana titipan*. Pemilik dana titipan tertarik dengan
36 informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk
37 memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.

38 (e) *Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan*

- 1 *wakaf*. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan
2 wakaf, serta mereka yang berkepentingan akan informasi
3 mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.
- 4 (f) *Pengawas syariah*. Pengawas syariah yang berkepenting-
5 an dengan informasi tentang kepatuhan pengelola bank
6 akan prinsip syariah.
- 7 (g) *Karyawan*. Karyawan dan kelompok-kelompok yang
8 mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas
9 dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga tertarik
10 dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk
11 menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan
12 balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.
- 13 (h) *Pemasok dan mitra usaha lainnya*. Pemasok dan mitra
14 usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkin-
15 kan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang
16 terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Mitra usaha
17 berkepentingan pada entitas syariah dalam tenggang waktu
18 yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman qardh kecuali
19 kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada
20 kelangsungan hidup entitas syariah.
- 21 (i) *Pelanggan*. Para pelanggan berkepentingan dengan infor-
22 masi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah,
23 terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka
24 panjang dengan, atau tergantung pada, entitas syariah.
- 25 (j) *Pemerintah*. Pemerintah dan berbagai lembaga yang
26 berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan
27 alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan
28 aktivitas entitas syariah. Mereka juga membutuhkan
29 informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah,
30 menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk
31 menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
- 32 (k) *Masyarakat*. Entitas syariah mempengaruhi anggota
33 masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas syariah
34 dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian
35 nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan
36 perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan
37 keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyedia-
38 kan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan



1 terakhir kemakmuran entitas syariah serta rangkaian
2 aktivitasnya.

3

4 10. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
5 bersifat umum. Dengan demikian tidak sepenuhnya dapat
6 memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. Berhubung para
7 investor saham dan pemilik dana *syirkah* temporer merupakan
8 penanam modal/dana berisiko ke entitas syariah, maka
9 ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka
10 juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan pemakai lain.

11

12 11. Manajemen entitas syariah memikul tanggung jawab
13 utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
14 entitas syariah. Manajemen juga berkepentingan dengan
15 informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meskipun
16 memiliki akses terhadap informasi manajemen dan keuangan
17 tambahan yang membantu dalam melaksanakan tanggung jawab
18 perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.
19 Manajemen memiliki kemampuan untuk menentukan bentuk
20 dan isi informasi tambahan tersebut untuk memenuhi
21 kebutuhannya sendiri. Namun demikian, pelaporan informasi
22 semacam itu berada di luar ruang lingkup kerangka dasar ini.
23 Bagaimanapun juga, laporan keuangan yang diterbitkan
24 didasarkan pada informasi yang digunakan manajemen tentang
25 posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan.

26

27 **Paradigma Transaksi Syariah**

28

29 12. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar
30 bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah
31 (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh
32 umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara
33 material dan spiritual (*al-falah*).

34

35 13. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat
36 manusia memiliki akuntabilitas dan nilai *illahiah* yang
37 menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter
38 baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma

1 ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya
2 karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin
3 pasar (*market discipline*) yang baik.

4

5 14. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang
6 mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan
7 larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal
8 dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama
9 makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan
10 muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi
11 semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan transaksi
12 syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-
13 nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan
14 tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis.

15

16 **Asas Transaksi Syariah**

17

18 15. Transaksi syariah berasaskan pada prinsip:

- 19 (a) persaudaraan (*ukhuwah*);
- 20 (b) keadilan (*'adalah*);
- 21 (c) kemaslahatan (*maslahah*);
- 22 (d) keseimbangan (*tawazun*); dan
- 23 (e) universalisme (*syumuliyah*).

24

25 16. Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) esensinya merupa-
26 kan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi
27 kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum
28 dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah
29 menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh
30 manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh
31 mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah
32 dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal
33 (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong
34 (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan
35 beraliansi (*tahaluf*).

36

37 17. Prinsip keadilan (*'adalah*) esensinya menempatkan
38 sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya



- 1 pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai
- 2 posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa
- 3 aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:
- 4 (a) riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik
- 5 riba *nasiah* maupun *fadhli*);
- 6 (b) kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain,
- 7 maupun lingkungan);
- 8 (c) *maysir* (unsur judi dan sikap spekulatif);
- 9 (d) *gharar* (unsur ketidakjelasan); dan
- 10 (e) haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta
- 11 aktivitas operasional yang terkait).

12

13 18. Esensi riba adalah setiap tambahan pada pokok piutang

14 yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam serta

15 derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, dan setiap

16 tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antar

17 barang-barang *ribawi* termasuk pertukaran uang (*money ex-*

18 *change*) yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang

19 tidak sejenis secara tidak tunai.

20

21 19. Esensi kezaliman (*dzulm*) adalah menempatkan sesuatu

22 tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran,

23 kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya

24 dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman

25 dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara

26 keseluruhan, bukan hanya sebagian; atau membawa

27 kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang

28 melakukan transaksi.

29

30 20. Esensi *maysir* adalah setiap transaksi yang bersifat

31 spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat

32 perjudian (*gambling*).

33

34 21. Esensi *gharar* adalah setiap transaksi yang berpotensi

35 merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur

36 ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak

37 adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk *gharar*

38 antara lain:



- 1 (a) tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek
- 2 akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah
- 3 ada maupun belum ada;
- 4 (b) menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan
- 5 penjual;
- 6 (c) tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas
- 7 barang/jasa;
- 8 (d) tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar
- 9 dan alat pembayaran;
- 10 (e) tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad;
- 11 (f) kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya
- 12 dengan yang ditentukan dalam transaksi;
- 13 (g) adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi
- 14 yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau
- 15 ketidakpahaman yang ditransaksikan.
- 16

17 22. Esensi haram adalah segala unsur yang dilarang secara
18 tegas dalam Al Quran dan As Sunah.

19
20 23. Prinsip kemaslahatan (*mashlahah*) esensinya merupa-
21 kan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi
22 duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan
23 kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur
24 yakni kepatuhan syariah (*halal*) serta bermanfaat dan
25 membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek secara
26 keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi
27 syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara
28 keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah
29 (*maqasid syariah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap:

- 30 (a) akidah, keimanan dan ketakwaan (*dien*);
- 31 (b) intelek (*'aql*);
- 32 (c) keturunan (*nasl*);
- 33 (d) jiwa dan keselamatan (*nafs*); dan
- 34 (e) harta benda (*mal*).
- 35

36 24. Prinsip keseimbangan (*tawazun*) esensinya meliputi
37 keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan
38 publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan



1 keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi
2 syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi
3 keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik
4 (*shareholder*). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya
5 difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua
6 pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan
7 ekonomi.

8
9 25. Prinsip universalisme (*syumuliyah*) esensinya dapat
10 dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang
11 berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama,
12 ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta
13 (*rahmatan lil alamin*).

14
15 26. Transaksi syariah terikat dengan nilai-nilai etis meliputi
16 aktivitas sektor keuangan dan sektor riil yang dilakukan secara
17 koheren tanpa dikotomi sehingga keberadaan dan nilai uang
18 merupakan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan.

19 20 **Karakteristik Transaksi Syariah**

21
22 27. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma
23 dan azas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan
24 persyaratan sebagai berikut:

- 25 (a) transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham
26 dan saling ridha;
- 27 (b) prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya
28 halal dan baik (*thayib*);
- 29 (c) uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan
30 pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
- 31 (d) tidak mengandung unsur riba;
- 32 (e) tidak mengandung unsur kezaliman;
- 33 (f) tidak mengandung unsur *maysir*;
- 34 (g) tidak mengandung unsur *gharar*;
- 35 (h) tidak mengandung unsur haram;
- 36 (i) tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value*
37 *of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan
38 usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan

- 1 usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi*
2 (*no gain without accompanying risk*);
3 (j) transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas
4 dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa
5 merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan
6 menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta
7 tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang
8 berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad;
9 (k) tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan
10 (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*);
11 dan
12 (l) tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap
13 (*risywah*).

14
15 28. Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang
16 bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat
17 nonkomersial. Transaksi syariah komersial dilakukan antara lain
18 berupa: investasi untuk mendapatkan bagi hasil; jual beli barang
19 untuk mendapatkan laba; dan atau pemberian layanan jasa
20 untuk mendapatkan imbalan.

21
22 29. Transaksi syariah nonkomersial dilakukan antara lain
23 berupa: pemberian dana pinjaman atau talangan (*qardh*);
24 penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak,
25 sedekah, wakaf dan hibah.

26 27 28 **TUJUAN LAPORAN KEUANGAN**

29
30 30. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan
31 informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta
32 perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang
33 bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan
34 keputusan ekonomi. Disamping itu, tujuan lainnya adalah:

- 35 (a) meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam
36 semua transaksi dan kegiatan usaha;
37 (b) informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip
38 syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan



- 1 beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada
2 dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;
3 (c) informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan
4 tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam
5 mengaman-kan dana, menginvestasikannya pada tingkat
6 keuntungan yang layak; dan
7 (d) informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang
8 diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah*
9 temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban
10 (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk
11 pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan
12 wakaf.

13
14 31. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini
15 memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun
16 demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi
17 yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan
18 keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan
19 pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak
20 diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

21
22 32. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah
23 dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban
24 manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
25 Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau
26 pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka
27 dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin
28 mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual
29 investasi mereka dalam entitas syariah atau keputusan untuk
30 mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

31 32 **Posisi Keuangan, Kinerja, dan Perubahan Posisi** 33 **Keuangan**

34
35 33. Keputusan ekonomi yang diambil pemakai laporan
36 keuangan memerlukan evaluasi atas kemampuan entitas syariah
37 dalam menghasilkan kas (dan setara kas), dan waktu serta
38 kepastian dari hasil tersebut. Kemampuan ini akhirnya



1 menentukan, misalnya, kemampuan pembayaran kepada para
2 karyawan dan para pemasok, pembayaran kewajiban dan
3 pembagian penghasilan kepada para pemilik. Para pemakai
4 dapat mengevaluasi kemampuan entitas syariah dalam
5 menghasilkan kas (dan setara kas) dengan lebih baik kalau
6 mereka mendapat informasi yang difokuskan pada posisi
7 keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan entitas
8 syariah.

9

10 34. Posisi keuangan entitas syariah dipengaruhi oleh sumber
11 daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan
12 solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan
13 lingkungan. Informasi sumber daya ekonomi yang dikendalikan
14 dan kemampuan entitas syariah dalam memodifikasi sumber
15 daya ini di masa lalu berguna untuk memprediksi kemampuan
16 entitas syariah dalam menghasilkan kas (dan setara kas) di masa
17 depan. Informasi struktur keuangan berguna untuk memprediksi
18 kebutuhan pinjaman di masa depan dan bagaimana penghasilan
19 bersih (laba) dan arus kas di masa depan akan didistribusikan
20 kepada mereka yang memiliki hak di dalam entitas syariah;
21 informasi tersebut juga berguna untuk memprediksi seberapa
22 jauh entitas syariah akan berhasil meningkatkan lebih lanjut
23 sumber keuangannya. Informasi likuiditas dan solvabilitas
24 berguna untuk memprediksi kemampuan entitas syariah dalam
25 pemenuhan komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo.
26 Likuiditas merupakan ketersediaan kas jangka pendek di masa
27 depan setelah memperhitungkan komitmen yang ada. Solvabilitas
28 merupakan ketersediaan kas jangka panjang untuk memenuhi
29 komitmen pada saat jatuh tempo.

30

31 35. Informasi kinerja entitas syariah, terutama profitabilitas,
32 diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya
33 ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi
34 fluktuasi kinerja adalah penting dalam hubungan ini. Informasi
35 kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas entitas syariah
36 dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada.
37 Disamping itu, informasi tersebut juga berguna dalam perumusan
38 pertimbangan tentang efektivitas entitas syariah dalam



1 memanfaatkan tambahan sumber daya.

2

3 36. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah
4 bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan
5 operasi selama periode pelaporan. Informasi ini berguna bagi
6 pemakai sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas syariah
7 dalam menghasilkan kas (dan setara kas) serta kebutuhan
8 entitas syariah untuk memanfaatkan arus kas tersebut. Dalam
9 penyusunan laporan perubahan posisi keuangan, dana dapat
10 didefinisikan dalam berbagai cara, seperti, seluruh sumber daya
11 keuangan, modal kerja, aktiva likuid atau kas. Kerangka dasar
12 ini tidak mendefinisikan dana secara spesifik.

13

14 37. Informasi posisi keuangan terutama disediakan dalam
15 neraca. Informasi kinerja terutama disediakan dalam laporan
16 laba rugi. Dalam laporan keuangan, informasi perubahan posisi
17 keuangan dan laporan yang menjelaskan pemenuhan fungsi
18 sosial entitas syariah disajikan dalam laporan tersendiri.

19

20 38. Informasi lain yang tidak diatur secara khusus tetapi
21 relevan bagi pengambilan keputusan sebagian besar pengguna
22 laporan keuangan hendaknya disajikan dalam laporan keuangan.

23

24 39. Komponen-komponen laporan keuangan saling terkait
25 karena mencerminkan aspek-aspek yang berbeda dari transaksi
26 transaksi atau peristiwa lain yang sama. Meskipun setiap laporan
27 menyediakan informasi yang berbeda satu sama lain, tidak ada
28 yang hanya dimaksudkan untuk memenuhi tujuan tunggal atau
29 menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk memenuhi
30 kebutuhan khusus pemakai. Misalnya, laporan laba rugi
31 menyediakan gambaran yang tidak lengkap tentang kinerja
32 kecuali kalau digunakan dalam hubungannya dengan neraca
33 dan laporan arus kas.

34

35 *Catatan dan Skedul Tambahan*

36

37 40. Laporan keuangan juga menampung catatan dan skedul
38 tambahan serta informasi lainnya. Misalnya, laporan tersebut

1 mungkin menampung informasi tambahan yang relevan dengan
2 kebutuhan pemakai neraca dan laporan laba rugi. Mungkin pula
3 mencakupi pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian
4 yang mempengaruhi entitas syariah dan setiap sumber daya
5 dan kewajiban (*obligation*) yang tidak dicantumkan dalam
6 neraca (seperti cadangan mineral). Informasi segmen-segmen
7 industri dan geografi serta pengaruhnya pada entitas syariah
8 akibat perubahan harga dapat juga disediakan dalam bentuk
9 informasi tambahan.

10

11 **ASUMSI DASAR**

12

13 **Dasar Akrual**

14

15 41. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun
16 atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan
17 peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat
18 kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan
19 dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan
20 keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan
21 yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada
22 pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan
23 penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban
24 pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang
25 merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh
26 karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi
27 transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna
28 bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

29

30 42. Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil
31 usaha menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian
32 hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang
33 dimaksud adalah keuntungan bruto (*gross profit*).

34

35 **Kelangsungan Usaha**

36

37 43. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi
38 kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan



1 usahanya di masa depan. Karena itu, entitas syariah diasumsikan
2 tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi
3 secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan
4 tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan
5 dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus
6 diungkapkan.

7

8

9 **KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN** 10 **KEUANGAN**

11

12 44. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang
13 membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi
14 pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu:
15 dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

16

17 **Dapat Dipahami**

18

19 45. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam
20 laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat
21 dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan
22 memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi
23 dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari
24 informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian,
25 informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan
26 keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar
27 pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat
28 dipahami oleh pemakai tertentu.

29

30 **Relevan**

31

32 46. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk
33 memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan
34 keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat
35 mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu
36 mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa
37 depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka
38 di masa lalu.



1 47. Peran informasi dalam peramalan (*predictive*) dan
2 penegasan (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain. Misalnya,
3 informasi struktur dan besarnya aset-aset yang dimiliki
4 bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha meramalkan
5 kemampuan entitas syariah dalam memanfaatkan peluang dan
6 bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama
7 juga berperan dalam memberikan penegasan (*confirmatory*
8 *role*) terhadap prediksi yang lalu, misalnya, tentang bagaimana
9 struktur keuangan entitas syariah diharapkan tersusun atau
10 tentang hasil dari operasi yang direncanakan.

11
12 48. Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu
13 seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi
14 keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung
15 menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran dividen dan
16 upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan entitas
17 syariah untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo.
18 Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam
19 bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan
20 keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan
21 menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa
22 lalu. Misalnya, nilai prediktif laporan laba rugi dapat ditingkatkan
23 kalau pos-pos penghasilan atau beban yang tidak biasa, abnor-
24 mal dan jarang terjadi diungkapkan secara terpisah.

25

26 **Materialitas**

27

28 49. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan
29 materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja
30 sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya,
31 pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian
32 risiko dan peluang yang dihadapi entitas syariah tanpa
33 mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen
34 baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik
35 hakekat maupun materialitas dipandang penting, misalnya
36 jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan
37 entitas syariah.

38



1 50. Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk
2 mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi
3 tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang
4 diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung
5 pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan
6 situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*)
7 atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Karenanya,
8 materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik
9 pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus
10 dimiliki agar informasi dipandang berguna.

11
12 51. Dalam hal bagi hasil, dasar yang dibagihasilkan harus
13 mencerminkan jumlah yang sebenarnya tanpa mempertimbang-
14 kan pelaksanaan konsep materialitas.

15 16 **Keandalan**

17
18 52. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*).
19 Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang
20 menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan
21 pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful*
22 *representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang
23 secara wajar diharapkan dapat disajikan.

24
25 53. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau
26 penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan
27 informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
28 Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian
29 dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin
30 tidak tepat bagi entitas syariah untuk mengakui jumlah seluruh
31 tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk
32 mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.

33 34 **Penyajian Jujur**

35
36 54. Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambar-
37 kan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang
38 seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan



1 untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan
2 dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset,
3 kewajiban, dana *syirkah* temporer, dan ekuitas entitas syariah
4 pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.
5

6 55. Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari
7 risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang
8 seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena
9 kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan
10 kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta
11 peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau
12 menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan
13 makna transaksi dan peristiwa tersebut. Dalam kasus tertentu,
14 pengukuran dampak keuangan dari suatu pos sangat tidak pasti
15 sehingga entitas syariah pada umumnya tidak mengakuinya
16 dalam laporan keuangan. Misalnya, meskipun dalam kegiatan
17 usahanya entitas syariah dapat menghasilkan *goodwill*, tetapi
18 lazimnya sulit untuk mengidentifikasi atau mengukur *goodwill*
19 secara andal. Namun, dalam kasus lain, pengakuan suatu pos
20 tertentu tetap dianggap relevan dengan mengungkapkan risiko
21 kesalahan sehubungan dengan pengakuan dan pengukurannya.
22

23 ***Substansi Mengungguli Bentuk***

24
25 56. Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan
26 jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan,
27 maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan
28 substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk
29 hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu
30 konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.
31 Substansi transaksi tersebut harus mengacu kepada substansi
32 transaksi sesuai prinsip syariah dan dalam kondisi tertentu,
33 prinsip syariah menentukan substansi ekonomi dalam transaksi
34 syariah. Contohnya *ijarah* dengan hak opsi untuk pengalihan
35 kepemilikan aset *ijarah* kepada penyewa (*ijarah muntahiyah*
36 *bittamlik*) secara substansi ekonomi aset *ijarah* tidak diakui
37 sebagai aset oleh penyewa.
38



1 *Netralitas*

2

3 57. Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum
4 pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan
5 pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan
6 informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal
7 tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan
8 yang berlawanan.

9

10 *Pertimbangan Sehat*

11

12 58. Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi
13 ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti
14 ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat
15 pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang
16 mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan
17 mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan meng-
18 gunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan
19 laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur
20 kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi
21 ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak dinyatakan
22 terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu
23 rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak
24 memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan
25 tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja
26 menetapkan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau
27 pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga
28 laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu, tidak
29 memiliki kualitas andal.

30

31 *Kelengkapan*

32

33 59. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan
34 keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.
35 Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*)
36 mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan
37 dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau
38 dari segi relevansi.



1 *Dapat Dibandingkan*

2

3 60. Pemakai harus dapat membandingkan laporan
4 keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi
5 kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai
6 juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar
7 entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta
8 perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu,
9 pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan
10 peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten
11 untuk entitas syariah tersebut, antar periode entitas syariah yang
12 sama, untuk entitas syariah yang berbeda, maupun dengan
13 entitas lain.

14

15 61. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat
16 diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat
17 informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam
18 penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta
19 pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan
20 untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang
21 diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama
22 dalam sebuah entitas syariah dari satu periode ke periode dan
23 dalam entitas syariah yang berbeda. Ketaatan pada standar
24 akuntansi keuangan syariah, termasuk pengungkapan kebijakan
25 akuntansi yang digunakan oleh entitas syariah, membantu
26 pencapaian daya banding.

27

28 62. Kebutuhan terhadap daya banding jangan dikacaukan
29 dengan keseragaman semata-mata dan tidak seharusnya
30 menjadi hambatan dalam memperkenalkan standar akuntansi
31 keuangan syariah yang lebih baik. Entitas syariah tidak perlu
32 meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras dengan
33 karakteristik kualitatif relevansi dan keandalan. Entitas syariah
34 juga tidak perlu mempertahankan suatu kebijakan akuntansi
35 kalau ada alternatif lain yang lebih relevan dan lebih andal.

36

37 63. Berhubung pemakai ingin membandingkan posisi
38 keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan antar periode,



1 maka entitas syariah perlu menyajikan informasi periode
2 sebelumnya dalam laporan keuangan.

3

4 **Kendala Informasi yang Relevan dan Andal**

5

6 ***Tepat Waktu***

7

8 64. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam
9 pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan
10 relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan
11 manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan
12 informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu,
13 seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi
14 atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan
15 informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh
16 aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal
17 tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam
18 usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan,
19 kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang
20 menentukan.

21

22 ***Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat***

23

24 65. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih
25 merupakan suatu kendala yang dapat terjadi (*pervasive*)
26 daripada suatu karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan
27 informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun
28 demikian, secara substansi evaluasi biaya dan manfaat
29 merupakan suatu proses pertimbangan (*judgement process*).
30 Biaya tidak harus dipikul oleh mereka yang menikmati manfaat.
31 Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain disamping
32 mereka yang menjadi tujuan penyampaian informasi. Karena
33 alasan inilah maka sulit untuk mengaplikasikan uji biaya-manfaat
34 pada kasus tertentu. Namun demikian, dewan penyusun standar
35 akuntansi syariah, seperti juga para penyusun dan pemakai
36 laporan keuangan, harus menyadari kendala ini.

37

38



1 ***Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif***

2

3 66. Dalam praktek, keseimbangan atau *trade-off* di antara
4 berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada
5 umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu
6 keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk
7 memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari
8 berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda
9 merupakan masalah pertimbangan profesional.

10

11 **Penyajian Wajar**

12

13 67. Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan
14 pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar,
15 posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu
16 entitas syariah. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani
17 secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik
18 kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai
19 biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan
20 apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan
21 yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi
22 semacam itu.

23

24

25 **UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

26

27 68. Sesuai karakteristik maka laporan keuangan entitas
28 syariah antara lain meliputi:

29 (a) komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan
30 komersial:

31 (i) laporan posisi keuangan;

32 (ii) laporan laba rugi;

33 (iii) laporan arus kas; dan

34 (iv) laporan perubahan ekuitas.

35 (b) komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan
36 sosial:

37 (i) laporan sumber dan penggunaan dana zakat; dan

38 (ii) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.



- 1 (c) komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan
2 kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah
3 tersebut.
4

5 69. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan
6 dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam
7 beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya.
8 Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur
9 yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi
10 keuangan adalah aset, kewajiban, dana *syirkah* temporer, dan
11 ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja
12 dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan
13 perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai
14 unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur
15 neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak
16 mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan
17 secara khusus.
18

19 70. Penyajian berbagai unsur ini dalam neraca dan laporan
20 laba rugi memerlukan proses subklasifikasi. Misalnya, aset dan
21 kewajiban dapat diklasifikasikan menurut hakekat atau fungsinya
22 dalam bisnis entitas syariah dengan maksud untuk menyajikan
23 informasi dengan cara yang paling berguna bagi pemakai untuk
24 tujuan pengambilan keputusan ekonomi.
25

26 **Posisi Keuangan**

27
28 71. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan peng-
29 ukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana *syirkah*
30 temporer dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:
31 (a) *Aset* adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah
32 sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
33 manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh
34 entitas syariah.
35 (b) *Kewajiban* merupakan hutang entitas syariah masa kini
36 yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya
37 diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya
38 entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.



1 (c) *Dana syirkah temporer* adalah dana yang diterima
2 sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari
3 individu dan pihak lainnya dimana entitas syariah
4 mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan
5 dana tersebut dengan pembagian hasil investasi
6 berdasarkan kesepakatan.

7 (d) *Ekuitas* adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah
8 dikurangi semua kewajiban dan dana *syirkah* temporer.

9

10 72. Definisi aset dan kewajiban mengidentifikasi ciri
11 esensialnya tetapi tidak mencoba untuk menspesifikasikan
12 kriteria yang perlu dipenuhi sebelum diakui di dalam neraca.
13 Jadi, definisi tersebut mencakup pos-pos yang tidak diakui
14 sebagai aset atau kewajiban di dalam neraca karena tidak
15 memenuhi kriteria untuk diakui seperti yang dibahas dalam
16 paragraf 109 sampai 126. Khususnya, harapan bahwa manfaat
17 ekonomi di masa depan akan mengalir dari atau ke dalam entitas
18 syariah harus cukup pasti untuk memenuhi kriteria probabilitas
19 dalam paragraf 112 sebelum suatu aset atau kewajiban diakui.

20

21 73. Dalam penilaian apakah suatu pos memenuhi definisi
22 aset, kewajiban, dana *syirkah* temporer atau ekuitas, perhatian
23 perlu ditujukan pada substansi yang mendasari, serta realitas
24 ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

25

26 74. Neraca yang disusun menurut standar akuntansi
27 keuangan syariah yang berlaku dapat meliputi pos yang tidak
28 memenuhi definisi aset atau kewajiban dan tidak disajikan
29 sebagai bagian dari dana *syirkah* temporer atau ekuitas. Namun
30 demikian, definisi yang dirumuskan dalam paragraf 71 akan
31 mendasari peninjauan kembali terhadap standar akuntansi
32 keuangan syariah yang berlaku di masa depan dan perumusan
33 standar selanjutnya.

34

35 **Aset**

36

37 75. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam
38 aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan



1 sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan
2 setara kas kepada entitas syariah. Potensi tersebut dapat
3 berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari
4 aktivitas operasional entitas syariah. Mungkin pula berbentuk
5 sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau
6 berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas,
7 seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi
8 alternatif.

9

10 76. Entitas syariah biasanya menggunakan aset untuk
11 memproduksi barang atau jasa yang dapat memuaskan
12 kebutuhan dan keperluan pelanggan; berhubung barang atau
13 jasa ini dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan ini, pelanggan
14 bersedia membayar sehingga memberikan sumbangan kepada
15 arus kas entitas syariah. Kas sendiri memberikan jasa kepada
16 entitas syariah karena kekuasaannya terhadap sumber daya
17 yang lain.

18

19 77. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam
20 aset dapat mengalir ke dalam entitas syariah dengan beberapa
21 cara. Misalnya, aset dapat:

- 22 (a) digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam
- 23 produksi barang dan jasa yang dijual oleh entitas syariah;
- 24 (b) dipertukarkan dengan aset lain;
- 25 (c) digunakan untuk menyelesaikan kewajiban; atau
- 26 (d) dibagikan kepada para pemilik entitas syariah.

27

28 78. Banyak aset, misalnya, aset tetap memiliki bentuk fisik.
29 Namun demikian, bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk
30 menentukan eksistensi aset; karena itu, paten dan hak cipta,
31 misalnya, merupakan aset kalau manfaat ekonomi yang
32 diperoleh entitas syariah di masa depan dan kalau masing-masing
33 aset tersebut dikuasai entitas syariah.

34

35 79. Banyak aset, misalnya, piutang dan properti,
36 dihubungkan dengan hak menurut hukum, termasuk hak milik.
37 Dalam menentukan eksistensi aset, hak milik tidak esensial;
38 jadi, misalnya, properti yang diperoleh melalui sewa guna usaha



1 adalah aset jika entitas syariah mengendalikan manfaat yang
2 diharapkan dari properti tersebut. Meskipun kemampuan entitas
3 syariah untuk mengendalikan manfaat biasanya berasal dari
4 hak menurut hukum suatu barang atau jasa dapat memenuhi
5 definisi aset meskipun tidak dikuasai berdasarkan hukum.
6 Misalnya, pengetahuan yang diperoleh melalui aktivitas
7 pengembangan dapat memenuhi definisi aset jika, dengan
8 merahasiakan pengetahuan tersebut, entitas syariah menikmati
9 manfaat yang diharapkan dari pengetahuan tersebut.

10

11 80. Aset entitas syariah berasal dari transaksi atau peristiwa
12 lain yang terjadi di masa lalu. Entitas syariah biasanya
13 memperoleh aset melalui pembelian atau produksi sendiri, tetapi
14 transaksi atau peristiwa lain juga dapat menghasilkan aset;
15 misalnya properti yang diterima entitas syariah dari pemerintah
16 sebagai bagian dari program untuk merangsang pertumbuhan
17 ekonomi dalam suatu wilayah. Transaksi atau peristiwa yang
18 diharapkan terjadi di masa depan tidak dengan sendirinya
19 memunculkan aset; oleh karena itu, misalnya, maksud untuk
20 membeli persediaan tidak dengan sendirinya memenuhi definisi
21 aset.

22

23 81. Ada hubungan erat antara terjadinya pengeluaran dan
24 timbulnya aset, tetapi kedua peristiwa ini tidak perlu harus terjadi
25 bersamaan. Oleh karena itu, kalau entitas syariah melakukan
26 pengeluaran, peristiwa ini memberikan bukti bahwa entitas
27 syariah tersebut mengejar manfaat ekonomi tetapi belum
28 merupakan bukti konklusif bahwa suatu barang atau jasa yang
29 memenuhi definisi aset telah diperoleh. Sama halnya dengan
30 tidak adanya pengeluaran yang bersangkutan tidak
31 mengecualikan suatu barang atau jasa memenuhi definisi aset
32 dan dengan demikian terdapat kemungkinan untuk diakui
33 pencantumannya dalam neraca; misalnya, barang atau jasa yang
34 telah didonasikan kepada entitas syariah memenuhi definisi aset.

35

36

37

38



1 Kewajiban

2

3 82. Karakteristik esensial kewajiban (*liabilities*) adalah
4 bahwa entitas syariah mempunyai kewajiban (*obligation*) masa
5 kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk
6 bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara
7 tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai
8 konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan.
9 Ini biasanya memang demikian, misalnya, dengan disertai jumlah
10 yang terhutang dari barang dan jasa yang telah diterima. Namun,
11 kewajiban juga timbul dari praktek bisnis yang lazim, kebiasaan
12 dan keinginan untuk memelihara hubungan bisnis yang baik atau
13 bertindak dengan cara yang adil. Kalau misalnya sebagai suatu
14 kebijakan, entitas syariah memutuskan untuk menarik kembali
15 produknya yang cacat meskipun masa garansi sebenarnya telah
16 lewat, jumlah yang diharapkan akan dibayarkan tersebut
17 merupakan kewajiban.

18

19 83. Suatu perbedaan perlu dilakukan antara kewajiban
20 sekarang dan komitmen di masa depan. Keputusan manajemen
21 entitas syariah untuk membeli aset di masa depan tidak dengan
22 sendirinya menimbulkan kewajiban sekarang. Kewajiban
23 biasanya timbul hanya kalau aset telah diserahkan atau entitas
24 syariah telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan
25 untuk membeli aset. Pada kasus yang terakhir, hakekat perjanjian
26 yang tak dapat dibatalkan berarti bahwa konsekuensi ekonomi
27 dari kegagalan untuk memenuhi kewajiban, misalnya, karena
28 adanya hukuman yang substansial, membuat entitas syariah
29 memiliki sedikit pilihan, itu pun kalau ada, untuk mencegah
30 pengeluaran sumber daya kepada pihak lain.

31

32 84. Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan
33 entitas syariah untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki
34 manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain.
35 Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan
36 dengan berbagai cara, misalnya, dengan:

37 (a) pembayaran kas;

38 (b) penyerahan aset lain;



- 1 (c) pemberian jasa;
- 2 (d) penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain;
- 3 atau
- 4 (e) konversi kewajiban menjadi ekuitas.
- 5 Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti
- 6 kreditur membebaskan atau membatalkan haknya.
- 7

8 85. Kewajiban timbul dari transaksi atau peristiwa masa
9 lalu. Jadi, misalnya, pembelian barang atau penggunaan jasa
10 menimbulkan hutang usaha (kecuali kalau dibayar di muka atau
11 pada saat penyerahan) dan penerimaan pinjaman bank syariah
12 menimbulkan kewajiban untuk membayar kembali pinjaman ter-
13 sebut. Entitas syariah juga dapat mengakui sebagai kewajiban
14 jumlah rabat masa depan yang didasarkan pada jumlah pem-
15 belian tahunan para pelanggan; dalam kasus ini, penjualan
16 barang masa lalu merupakan transaksi yang menimbulkan
17 kewajiban.

18
19 86. Beberapa jenis kewajiban hanya dapat diukur dengan
20 menggunakan estimasi dalam derajat yang substansial.
21 Beberapa entitas syariah menyebut kewajiban ini sebagai
22 penyisihan (*provision*). Dalam pengertian sempit, penyisihan
23 semacam itu tidak dipandang sebagai kewajiban karena hanya
24 mencakupi jumlah yang dapat ditentukan tanpa perlu membuat
25 estimasi. Definisi kewajiban dalam paragraf 71 mengikuti
26 pendekatan luas. Jadi, kalau penyisihan menyangkut kewajiban
27 masa kini dan memenuhi ketentuan lain dalam definisi tersebut,
28 maka pos yang bersangkutan merupakan kewajiban meskipun
29 jumlahnya harus diestimasi. Contohnya adalah penyisihan untuk
30 pembayaran yang akan dilakukan terhadap garansi berjalan dan
31 penyisihan untuk menutup kewajiban manfaat pensiun.

32 33 **Dana *Syirkah* Temporer**

34
35 87. Dana *syirkah* temporer adalah dana yang diterima oleh
36 entitas syariah dimana entitas syariah mempunyai hak untuk
37 mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan
38 kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik



1 dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan;
2 sedangkan dalam hal dana *syirkah* temporer berkurang
3 disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur
4 kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran
5 kesepakatan, entitas syariah tidak berkewajiban mengembalikan
6 atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut. Contoh
7 dari dana *syirkah* temporer adalah penerimaan dana dari
8 investasi *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*,
9 *musyarakah*, dan akun lain yang sejenis.

10

11 88. Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan
12 sebagai kewajiban. Hal ini karena entitas syariah tidak
13 berkewajiban, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan
14 jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian
15 atau wanprestasi entitas syariah. Di sisi lain, dana *syirkah*
16 temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena
17 mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak
18 mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang
19 saham, seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan
20 yang berasal dari aset lancar dan aset noninvestasi (*current*
21 *and other non investment accounts*).

22

23 89. Hubungan antara entitas syariah dan pemilik dana
24 *syirkah* temporer merupakan hubungan kemitraan berdasarkan
25 akad *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*
26 atau *musyarakah*. Entitas syariah mempunyai hak untuk
27 mengelola dan menginvestasikan dana yang diterima dengan
28 atau tanpa batasan seperti mengenai tempat, cara, atau obyek
29 investasi.

30

31 90. Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur
32 neraca dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang
33 memberikan hak kepada entitas syariah untuk mengelola dan
34 menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana
35 dimaksud dengan dana lainnya.

36

37 91. Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian
38 atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian



1 berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian
2 hasil dana *syirkah* temporer dapat dengan konsep bagi hasil
3 atau bagi untung.

4

5 **Ekuitas**

6

7 92. Meskipun dalam paragraf 71, didefinisikan sebagai re-
8 sidual, ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca. Misalnya,
9 dalam perseroan terbatas, setoran modal oleh para pemegang
10 saham, saldo laba (*retained earnings*), penyisihan saldo laba
11 dan penyisihan penyesuaian pemeliharaan modal masing-masing
12 disajikan secara terpisah. Klasifikasi semacam itu dapat menjadi
13 relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan pemakai
14 laporan keuangan apabila pos tersebut mengindikasikan
15 pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap
16 kemampuan entitas syariah untuk membagikan atau meng-
17 gunakan ekuitas. Klasifikasi tersebut juga dapat merefleksikan
18 fakta bahwa pihak-pihak dengan hak kepemilikannya masing-
19 masing dalam entitas syariah mempunyai hak yang berbeda
20 dalam hubungannya dengan penerimaan dividen atau
21 pembayaran kembali modal.

22

23 93. Pembentukan cadangan kadang-kadang diharuskan
24 oleh suatu peraturan perundangan yang berlaku untuk
25 memberikan perlindungan tambahan kepada entitas syariah dan
26 para krediturnya terhadap kerugian yang ditimbulkan. Cadangan
27 yang lain dapat dibentuk kalau hukum pajak memberikan
28 pembebasan dari, atau pengurangan dalam kewajiban pajak pada
29 waktu dilakukan pemindahan ke cadangan semacam itu.
30 Eksistensi serta besarnya cadangan menurut peraturan
31 perundangan yang berlaku ini merupakan informasi yang relevan
32 untuk kebutuhan pengambilan keputusan bagi para pemakai
33 laporan keuangan. Pemindahan ke cadangan tersebut lebih
34 merupakan penyisihan saldo laba daripada beban.

35

36 94. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam neraca ter-
37 gantung pada pengukuran aset, kewajiban dan dana *syirkah*
38 temporer. Biasanya hanya karena faktor kebetulan kalau jumlah



1 ekuitas agregat sama dengan jumlah nilai pasar keseluruhan
2 (*aggregate market value*) dari saham entitas syariah atau
3 jumlah yang dapat diperoleh dengan melepaskan seluruh aset
4 bersih entitas syariah baik satu persatu (*liquidating value*)
5 atau secara keseluruhan dalam kondisi kelangsungan usaha
6 (*going concern value*).

7
8 95. Aktivitas bisnis sering dilakukan melalui beberapa
9 bentuk entitas syariah seperti entitas perseorangan, persekutuan
10 dan *trust*, serta badan usaha milik negara. Kerangka hukum
11 bagi berbagai entitas syariah semacam itu seringkali berbeda
12 dengan yang berlaku bagi perseroan terbatas. Misalnya,
13 mungkin hanya sedikit saja, walaupun ada, pembatasan-
14 pembatasan terhadap pembagian jumlah yang tergolong dalam
15 ekuitas kepada para pemilik atau pihak iain. Namun demikian,
16 definisi ekuitas dan aspek-aspek lain dalam kerangka dasar yang
17 mengatur ekuitas berlaku untuk entitas syariah semacam itu.

18 19 **Kinerja**

20
21 96. Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai
22 ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti
23 imbalan investasi (*return on investment*) atau penghasilan per
24 saham (*earnings per share*). Unsur yang langsung berkaitan
25 dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan
26 dan beban.

27
28 97. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai
29 berikut:

- 30 (a) Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi
31 selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan
32 atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang
33 mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari
34 kontribusi penanam modal.
35 (b) Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi
36 selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar
37 atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang
38



1 mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut
2 pembagian kepada penanam modal.

3

4 98. Definisi penghasilan dan beban mengidentifikasi ciri-
5 ciri esensial namun tidak mencoba untuk mengidentifikasi
6 kriteria yang perlu dipenuhi sebelum diakui dalam laporan laba
7 rugi. Kriteria pengakuan penghasilan dan beban dibahas dalam
8 paragraf 109 sampai dengan 126.

9

10 99. Penghasilan dan beban dapat disajikan dalam laporan
11 laba rugi dengan beberapa cara yang berbeda demi untuk
12 menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan
13 keputusan ekonomi. Misalnya, pembedaan antara pos
14 penghasilan dan beban yang berasal dan tidak berasal dari
15 pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa (*ordinary*)
16 merupakan praktek yang lazim. Pembedaan ini dilakukan
17 berdasarkan argumentasi bahwa sumber suatu pos adalah
18 relevan dalam mengevaluasi kemampuan entitas syariah untuk
19 menghasilkan kas (dan setara kas) di masa depan; misalnya,
20 aktivitas insidental seperti pengalihan investasi jangka panjang
21 tampaknya tidak akan terjadi secara reguler. Pada waktu
22 membedakan pos dengan cara ini perlu dipertimbangkan
23 hakekat entitas syariah dan operasinya. Pos yang timbul dari
24 aktivitas yang biasa bagi suatu entitas syariah mungkin tidak
25 biasa bagi entitas syariah dan entitas lain.

26

27 100. Pembedaan antara pos penghasilan dan beban dan
28 penggabungan pos tersebut dengan cara berbeda juga
29 memungkinkan penyajian beberapa ukuran kinerja entitas
30 syariah, masing-masing dengan derajat cakupan yang berbeda.
31 Misalnya, laporan laba rugi dapat menyajikan laba kotor, laba
32 bersih dari aktivitas biasa sebelum pajak, laba bersih dari
33 aktivitas biasa setelah pajak, dan laba bersih.

34

35 **Penghasilan**

36

37 101. Definisi penghasilan (*income*) meliputi baik penda-
38 patan (*revenues*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan



1 timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa
2 dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan,
3 penghasilan jasa (*fees*), bagi hasil, dividen, royalti dan sewa.

4

5 102. Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang
6 memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin
7 tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang
8 biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi
9 dan dengan demikian pada hakekatnya tidak berbeda dengan
10 pendapatan. Oleh karena itu, pos tersebut tidak dipandang
11 sebagai unsur terpisah dalam kerangka dasar ini.

12

13 103. Keuntungan meliputi, misalnya, pos yang timbul dalam
14 pengalihan aset tak lancar. Definisi penghasilan juga mencakupi
15 keuntungan yang belum direalisasi; misalnya, yang timbul dari
16 revaluasi sekuritas yang dapat dipasarkan (*marketable*) dan
17 dari kenaikan jumlah aset jangka panjang. Kalau diakui dalam
18 laporan laba rugi, keuntungan biasanya dicantumkan terpisah
19 karena informasi mengenai pos tersebut berguna dalam
20 pengambilan keputusan ekonomi. Keuntungan biasanya
21 dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan beban
22 yang bersangkutan.

23

24 104. Berbagai jenis aset dapat diterima atau bertambah
25 karena penghasilan; misalnya kas, piutang serta barang dan
26 jasa yang diterima sebagai penukar dari barang dan jasa yang
27 dipasok. Penghasilan dapat juga berasal dari penyelesaian
28 kewajiban. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan barang
29 dan jasa kepada kreditur untuk melunasi pinjaman.

30

31 **Beban**

32

33 105. Definisi beban mencakupi baik kerugian maupun beban
34 yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang
35 biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas
36 syariah yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan,
37 gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus
38 keluar atau berkurangnya aset seperti kas (dan setara kas),



1 persediaan dan aset tetap.

2

3 106. Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi
4 definisi beban yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul
5 dari aktivitas entitas syariah yang biasa. Kerugian tersebut
6 mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi, dan pada
7 hakekatnya tidak berbeda dari beban lain. Oleh karena itu,
8 kerugian tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam kerangka
9 dasar ini.

10

11 107. Kerugian dapat timbul, misalnya dari bencana
12 kebakaran, banjir, seperti juga yang timbul dari pelepasan aset
13 tidak lancar. Definisi beban juga mencakupi kerugian yang belum
14 direalisasi, misalnya, kerugian yang timbul dari pengaruh
15 peningkatan kurs valuta asing dalam hubungannya dengan
16 pinjaman entitas syariah dalam mata uang tersebut. Kalau
17 kerugian diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan
18 secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut
19 berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi.
20 Kerugian seringkali dilaporkan dalam jumlah bersih setelah
21 dikurangi dengan penghasilan yang bersangkutan.

22

23 **Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil**

24

25 108. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah*
26 temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan
27 dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu
28 periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak
29 bisa dikelompokkan sebagai beban (ketika untung) atau
30 pendapatan (ketika rugi). Namun, hak pihak ketiga atas bagi
31 hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada
32 pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan
33 entitas syariah.

34

35 **PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

36

37 109. Pengakuan (*recognition*) merupakan proses
38 pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta



1 kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam
2 neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan
3 menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam
4 jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau
5 laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus
6 diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk
7 mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui
8 pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun
9 melalui catatan atau materi penjelasan.

10

11 110. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui
12 kalau:

13 (a) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan
14 dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam
15 entitas syariah; dan

16 (b) pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
17 dengan andal.

18

19 111. Dalam mengkaji apakah suatu pos memenuhi kriteria
20 ini dan karenanya memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan
21 laba rugi, perhatian perlu ditujukan pada pertimbangan
22 materialitas yang dibahas dalam paragraf 49 sampai dengan
23 51. Hubungan antara unsur berarti bahwa suatu pos yang
24 memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur tertentu,
25 misalnya, suatu aset, secara otomatis memerlukan pengakuan
26 unsur lain, misalnya, penghasilan atau kewajiban.

27

28 *Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan*

29

30 112. Dalam kriteria pengakuan penghasilan, konsep
31 probabilitas digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian
32 bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan
33 pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah.
34 Konsep tersebut dimaksudkan untuk menghadapi ketidakpastian
35 lingkungan operasi entitas syariah. Pengkajian derajat
36 ketidakpastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa
37 depan dilakukan atas dasar bukti yang tersedia pada saat
38 penyusunan laporan keuangan. Misalnya, kalau pembayaran



1 suatu piutang besar kemungkinan terjadi (*probable*) dan tidak
2 ada bukti lain yang bertentangan, maka dapat dibenarkan untuk
3 mengakui piutang tersebut sebagai aset. Namun demikian, jika
4 populasi piutang banyak jumlahnya, maka besar kemungkinan
5 ada yang tidak tertagih; karena itu suatu beban yang
6 merepresentasikan pengurangan manfaat ekonomi yang
7 diharapkan harus diakui.

8

9 ***Keandalan Pengukuran***

10

11 113. Kriteria pengakuan suatu pos yang kedua adalah ada
12 tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat
13 keandalan tertentu (*reliable*) seperti yang dibahas pada paragraf
14 52 sampai dengan paragraf 59 kerangka dasar ini. Pada banyak
15 kasus, biaya atau nilai harus diestimasi; penggunaan estimasi
16 yang layak merupakan bagian esensial dalam penyusunan
17 laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat keandalan. Namun
18 demikian, kalau estimasi yang layak tak mungkin dilakukan, pos
19 tersebut tidak diakui dalam neraca atau laporan laba rugi.
20 Misalnya, hasil yang diharapkan dari suatu tuntutan hukum dapat
21 memenuhi definisi baik aset dan penghasilan maupun kriteria
22 probabilitas untuk dapat diakui; namun demikian, kalau tidak
23 mungkin diukur dengan tingkat keandalan tertentu, tuntutan
24 tersebut tidak dapat diakui sebagai aset atau sebagai
25 penghasilan; namun demikian, eksistensi tuntutan harus
26 diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul
27 tambahan.

28

29 114. Suatu pos yang pada saat tertentu tidak dapat
30 memenuhi kriteria pengakuan dalam paragraf 110 dapat
31 memenuhi syarat untuk diakui di masa depan sebagai akibat
32 dari peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian.

33

34 115. Suatu pos yang memiliki karakteristik esensial suatu
35 unsur tetapi tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan tetap perlu
36 diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul
37 tambahan. Pengungkapan ini dapat dibenarkan kalau
38 pengetahuan mengenai pos tersebut dipandang relevan untuk



- 1 mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi
- 2 keuangan suatu entitas syariah oleh pemakai laporan keuangan.

3

4 ***Pengakuan Aset***

5

- 6 116. Aset diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan
- 7 bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh entitas
- 8 syariah dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat
- 9 diukur dengan andal.

10

- 11 117. Aset tidak diakui dalam neraca kalau pengeluaran telah
- 12 terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin
- 13 mengalir ke dalam entitas syariah setelah periode akuntansi
- 14 berjalan. Sebagai alternatif transaksi semacam itu menimbulkan
- 15 pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Dengan perlakuan
- 16 ini tidak berarti pengeluaran yang dilakukan manajemen
- 17 mempunyai maksud yang lain daripada menghasilkan manfaat
- 18 ekonomi bagi entitas syariah di masa depan atau bahwa
- 19 manajemen salah arah. Implikasi satu-satunya adalah bahwa
- 20 tingkat kepastian dari manfaat ekonomi yang diterima entitas
- 21 syariah setelah periode akuntansi berjalan tidak mencukupi untuk
- 22 membenarkan pengakuan aset.

23

24 ***Pengakuan Kewajiban***

25

- 26 118. Kewajiban diakui dalam neraca kalau besar
- 27 kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang
- 28 mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk
- 29 menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang dan jumlah
- 30 yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Dalam
- 31 praktek, kewajiban (*obligations*) menurut kontrak yang belum
- 32 dilaksanakan oleh kedua belah pihak (misalnya, kewajiban atas
- 33 pesanan persediaan yang belum diterima) pada umumnya tidak
- 34 diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan. Namun
- 35 demikian, kewajiban (*obligation*) semacam itu dapat memenuhi
- 36 definisi kewajiban dan, kalau dalam keadaan tertentu kriteria
- 37 pengakuan terpenuhi, maka kewajiban (*obligation*) tersebut
- 38 dapat dianggap memenuhi syarat pengakuan. Dalam kasus ini,



1 pengakuan kewajiban mengakibatkan pengakuan aset atau beban
2 yang bersangkutan.

3

4 ***Pengakuan Dana Syirkah Temporer***

5

6 119. Pengakuan dana *syirkah* temporer dalam neraca
7 hanya dapat dilakukan jika entitas syariah memiliki kewajiban
8 untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran
9 sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah
10 yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Jumlah dana
11 *syirkah* temporer dapat berubah sesuai dengan hasil dari
12 investasinya.

13

14 ***Pengakuan Penghasilan***

15

16 120. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau
17 kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan
18 peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan
19 dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan
20 terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau
21 penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih aset yang
22 timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban
23 yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus
24 dibayar).

25

26 121. Prosedur yang biasanya dianut dalam praktek untuk
27 mengakui penghasilan, seperti misalnya ketentuan bahwa
28 penghasilan telah diperoleh, merupakan penerapan kriteria
29 pengakuan dalam kerangka dasar ini. Prosedur semacam ini
30 pada umumnya dimaksudkan untuk membatasi pengakuan
31 penghasilan pada pos-pos yang dapat diukur dengan andal dan
32 memiliki derajat kepastian yang cukup.

33

34 ***Pengakuan Beban***

35

36 122. Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan
37 manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan
38 aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur



1 dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan
2 dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset
3 (misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan aset tetap).

4

5 123. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar
6 hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos
7 penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya
8 disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (*matching of costs*
9 *with revenues*) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban
10 secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara
11 langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain
12 yang sama; misalnya, berbagai komponen beban yang
13 membentuk beban pokok penjualan (*cost or expense of goods*
14 *sold*) diakui pada saat yang sama sebagai penghasilan yang
15 diperoleh dari penjualan barang. Namun demikian, penerapan
16 konsep *matching* dalam kerangka dasar ini tidak
17 memperkenankan pengakuan pos dalam neraca yang tidak
18 memenuhi definisi aset atau kewajiban.

19

20 124. Kalau manfaat ekonomi diharapkan timbul selama
21 beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan
22 penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tak
23 langsung, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar
24 prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Hal ini sering
25 diperlukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan
26 penggunaan aset seperti aset tetap, *goodwill*, paten, merek
27 dagang. Dalam kasus semacam itu, beban ini disebut
28 penyusutan atau amortisasi. Prosedur alokasi ini dimaksudkan
29 untuk mengakui beban dalam periode akuntansi yang menikmati
30 manfaat ekonomi aset yang bersangkutan.

31

32 125. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau
33 pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan
34 atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak
35 memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui
36 dalam neraca sebagai aset.

37

38

1 126. Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat
 2 timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aset, seperti apabila
 3 timbul kewajiban akibat garansi produk.

4
 5 **PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

6
 7 127. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang
 8 untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan
 9 keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini
 10 menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu.

11
 12 128. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan
 13 dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan
 14 keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai
 15 berikut:

- 16 (a) Biaya historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau
 17 setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari
 18 imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh
 19 aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebe-
 20 sar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban
 21 (*obligation*), atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak
 22 penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang
 23 diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban
 24 dalam pelaksanaan usaha yang normal.
 25 (b) Biaya kini (*current cost*). Aset dinilai dalam jumlah kas
 26 (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang
 27 sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban di-
 28 nyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak
 29 didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlu-
 30 rkan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang.
 31 (c) Nilai realisasi/penyelesaian (*realisable/settlement value*).
 32 Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang
 33 dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pele-
 34 pasan normal (*orderly disposal*). Kewajiban dinyatakan
 35 sebesar nilai penyelesaian; yaitu, jumlah kas (atau setara
 36 kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan
 37 dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan
 38 usaha normal.



1 129. Dasar pengukuran yang lazimnya digunakan entitas
2 syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya
3 historis. Ini biasanya digabungkan dengan dasar pengukuran
4 yang lain. Misalnya, persediaan biasanya dinyatakan sebesar
5 nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi bersih (*lower*
6 *of cost or net realizable value*), akuntansi dana pensiun
7 menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar (*fair value*).

8
9 130. Penggunaan pengukuran nilai realisasi/penyelesaian
10 untuk menghasilkan nilai kas (atau setara kas) memerlukan
11 revaluasi secara periodik atas aset, kewajiban dan dana *syirkah*
12 temporer. Untuk itu, maka informasi yang dihasilkan harus andal
13 dan dapat dibandingkan. Untuk menjamin keandalan serta dapat
14 dibandingkan, manajemen harus menggunakan seluruh prinsip-
15 prinsip berikut selama merevaluasi aset, kewajiban dan dana
16 *syirkah* temporer:

- 17 (a) Adanya indikator eksternal, seperti harga pasar, yang
- 18 tersedia secara luas.
- 19 (b) Utilisasi seluruh informasi yang relevan baik positif atau
- 20 negatif.
- 21 (c) Utilisasi metode-metode penilaian yang logis dan relevan.
- 22 (d) Konsistensi penggunaan metode-metode penilaian yang
- 23 digunakan.
- 24 (e) Utilisasi penggunaan ahli-ahli penilai yang tersedia secara
- 25 luas.
- 26 (f) Konservatisme dalam proses penilaian sesuai objektivitas
- 27 dan netralitas dalam pemilihan nilai-nilai.

28
29 131. Meskipun relevan untuk merevaluasi nilai aset,
30 kewajiban dan dana *syirkah* temporer, namun penggunaan
31 konsep pengukuran nilai realisasi/penyelesaian tidak mudah
32 diterapkan dalam kondisi sekarang. Penggunaan konsep nilai
33 realisasi/penyelesaian dapat diterapkan untuk tujuan penyajian
34 informasi tambahan yang relevan dengan suatu akun investasi
35 yang telah ada atau yang prospektif. Namun, penyajian informasi
36 tambahan tersebut tidak mewajibkan entitas syariah untuk
37 mendistribusikan hasil investasi yang belum terealisasi.

38



EXPOSURE DRAFT

ED KDPPLKS

November 2006

EXPOSURE DRAFT
**KERANGKA DASAR
PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN SYARIAH**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



**ED
KDPPLKS**

**EXPOSURE DRAFT
KDPPLKS**



Hak cipta © 2006, Ikatan Akuntan Indonesia

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telp. (021) 319 04232
Fax. (021) 724 5078
Homepage: www.iaiglobal.or.id
Email: iai-info@iaiglobal.or.id

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01 – 29
Tujuan dan Peranan	01 – 04
Ruang Lingkup	05 – 08
Pemakai dan Kebutuhan Informasi	09 – 11
Paradigma Transaksi Syariah	12 – 14
Asas Transaksi Syariah	15 – 26
Karakteristik Transaksi Syariah	27 – 29
 TUJUAN LAPORAN KEUANGAN.....	 30 - 40
Posisi Keuangan, Kinerja dan Perubahan	
Posisi Keuangan	33 – 39
Catatan dan Skedul Tambahan	40
 ASUMSI DASAR.....	 41 - 43
Dasar AkruaI	41 – 42
Kelangsungan Usaha	43
 KARAKTERISTIK KUALITATIF	
LAPORAN KEUANGAN	44 – 67
Dapat Dipahami	45
Relevan	46 – 51
Materialitas	49 – 51
Keandalan	52 – 59
Penyajian Jujur	54 – 55
Substansi Mengungguli Bentuk	56
Netralitas	57
Pertimbangan Sehat	58
Kelengkapan	59
Dapat Dibandingkan	60 – 63

Kendala Informasi yang Relevan dan Andal	64-66
Tepat Waktu	64
Keseimbangan Antara Biaya dan Manfaat	65
Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif	66
Penyajian Wajar	67
UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN	68 - 109
Posisi Keuangan	71 - 74
Aset	75 - 81
Kewajiban	82 - 86
Dana Syirkah Temporer	87 - 91
Ekuitas	92 - 95
Kinerja	96 - 100
Penghasilan	101 - 104
Beban	105 - 107
Hak Pilih Ketiga atas Bagi Hasil	108
PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN	109 - 126
Profitabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan	112
Keandalan Pengukuran	113 - 115
Pengakuan Aset	116 - 117
Pengakuan Kewajiban	118
Pengakuan Dana Syirkah Temporer	119
Pengakuan Penghasilan	120 - 121
Pengakuan Beban	122 - 126
PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN	127 - 131